

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rifky Farah Izzatunisa^{1*}, Afifudin², Dyah Arini Rudiningtyas³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: rifkyfarahizzatunisa123@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of local government characteristics, audit opinion, independence ratio on the disclosure of local government financial reports. This quantitative research uses secondary data originating from regional government financial reports from 37 districts and cities in East Java Province for the period 2019 to 2022 obtained from the BPK or Financial Audit Agency website. This research determines the sample using the purposive sampling method. The independent variables used in this research are local government characteristics which are measured using the human development index, audit opinion and independence ratio. The dependent variable in this research is the disclosure of local government financial reports. The results of this research explain that regional government characteristic variables and audit opinions have a positive influence on the disclosure of regional government financial reports. Meanwhile, the independence ratio has a negative effect on the disclosure of regional government financial reports in districts and cities in East Java Province.

Keywords: Regional government characteristics, audit opinion, independence ratio, disclosure of regional government financial reports

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah yang mempunyai tugas dalam mengelola pembangunan menjalankan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat harus melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan terbuka. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dan mengutamakan masyarakat. Tetapi pada masa sekarang terdapat banyak kasus yang dimana pemerintah lebih mendahulukan keperluan pribadi di atas kepentingan masyarakat sehingga hal tersebut berujung pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Emiliana, 2021).

Sebagai contoh yang dilansir dari <https://databoks.katadata.co.id> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan dugaan korupsi pada semester I di tahun 2023. Tuduhan korupsi di kementerian atau organisasi daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi pokok bahasan laporan ini. Dari sekian banyak provinsi di Indonesia yakni Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah laporan dugaan korupsi terbanyak 359, Provinsi Jawa Barat dengan 266 laporan, Provinsi Jawa Timur 213 laporan, Provinsi Sumatera Barat 202 laporan, dan Provinsi Jawa Tengah 132 laporan.

Oleh karena itu, dengan beberapa kasus yang terungkap karena motif tersebut membuat masyarakat menyerukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi gugatan masyarakat dalam memberikan laporan pertanggungjawaban yaitu berupa adanya laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 adalah laporan yang memberikan rincian terkait keadaan atau posisi dan transaksi yang telah diselesaikan oleh suatu entitas. Selain memberikan informasi keuangan, tujuan dari laporan keuangan yaitu sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah khususnya memuat data yang menunjukkan

akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dapat diandalkan. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan isi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk setiap daerah, laporan keuangan tersebut wajib diungkap atau disajikan sebagai bahan pertanggung jawaban setiap daerah. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010.

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengatur keterbukaan laporan keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 yang mencakup tentang keuangan negara. Undang-Undang tersebut mengamanatkan pelaporan keuangan untuk setiap daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), menjelaskan bahwa pengungkapan laporan keuangan dibagi menjadi dua kategori yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Informasi yang harus diungkap untuk mematuhi persyaratan hukum dikenal sebagai pengungkapan wajib. Pengungkapan yang dilakukan secara sukarela adalah pengungkapan yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan sebagai informasi tambahan di luar laporan yang wajib diungkapkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat dibutuhkan untuk akuntabilitas dan transparansi suatu entitas atau organisasi. Pengungkapan yang dibuat dalam SAP harus memiliki kualitas, keunggulan, dan fungsi yang sama dengan penyajian laporan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Menurut Sasmita (2021), menyatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah dan sebagai pembeda dengan daerah lainnya. Besar kecilnya suatu daerah, umur administratif pemerintah daerah, *leverage*, ketergantungan daerah, belanja daerah dan faktor-faktor lain merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik pemerintah daerah.

Dalam hasil pemeriksaan BPK dalam pemberian opini yang dilansir dari <https://jatim.bpk.go.id>, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas BPK sebagai rangkaian akhir proses pemeriksaan. Seperti 37 Kabupaten/kota di Jawa Timur yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) yang diserahkan kepada BPK pada Kamis, 25/5/2023. Gubernur Jatim, Sekda Jatim, dan Anggota III BPK RI yang menjabat Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Negara III meninjau serah terima LHP tersebut. Meski mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK mengidentifikasi sejumlah permasalahan. Contohnya adalah masih terjadinya kekacauan dalam administrasi pajak dan retribusi daerah, penyusunan anggaran dan realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak teraturnya administrasi aset tetap, disorganisasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional sekolah, bantuan, dan kelebihan pembayaran atau penundaan penyelesaian pekerjaan modal dan barang. Meski demikian, Gubernur Jatim mengucapkan terima kasih atas perolehan WTP tersebut dan merekomendasikan agar diselesaikan segera berdasarkan rekomendasi BPK..

Rasio kemandirian menunjukkan seberapa baik kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat setelah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber untuk keperluan suatu daerah. Hal ini diyakini akan memberikan pengaruh positif terhadap LKPD. Namun pada prakteknya rasio kemandirian secara signifikan tidak banyak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut riset Dianti (2022), menunjukkan rerata rasio kemandirian hanya 27,8%. Lebih dari 70% pendanaan pemda bergantung dari luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya pendapatan tersebut masih didapat dari transfer pemerintah pusat dan pembiayaan. Rendahnya kemandirian pemda dapat menyebabkan kurangnya antusias pemerintah untuk melaksanakan pengungkapan penuh terhadap laporan keuangannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson et al (1991) dalam buku karangan Sudaryo dkk (2021:54), menguraikan bagaimana manajer bertindak sesuai dengan kepentingan bersama, menurut teori *stewardship*. ketika pengelola atau *steward* dan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda, maka *steward* akan berusaha bekerja sama daripada bersaing. Hal ini disebabkan oleh fakta *steward*, yang lebih menekankan upaya untuk memenuhi tujuan organisasi. Dan merasa memiliki kepentingan bersama dengan perilaku pemilik yaitu pertimbangan yang rasional.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2010 menguraikan tentang tujuan umum pelaporan keuangan merupakan tampilan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dan membantu dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh sejumlah pihak yang berkepentingan antara lain yaitu pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedomannya. SAP digunakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pelaporan keuangan. Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, menggantikan peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah mengacu dalam bentuk Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan penyusunannya. SAP berbasis kas menuju akrual dan penyusunannya berbasis akrual sebagai tiga lampiran utama. pemerintah daerah diharuskan dalam menyusun beberapa laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Suwardjono (2014), menjelaskan bahwa secara konseptual pengungkapan yaitu bagian komponen dari pelaporan keuangan. Namun, teknis pengungkapan diartikan sebagai fase terakhir dari proses akuntansi yakni penyajian data informasi dengan bentuk satu kesatuan laporan keuangan yang lengkap.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Lesmana (2010), menjelaskan karakteristik pemerintah daerah yaitu sifat yang khas dari kekuasaan administrasi suatu daerah. Komponen-komponen yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bisa menonjolkan karakteristik pemerintah daerah, menandai suatu daerah, dan pembeda dengan daerah lain. dalam penelitian ini, karakteristik pemerintah daerah dinyatakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setyowati (2016), mengungkapkan IPM merupakan tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan pemerintahan yang berkualitas memerlukan ekstensi komunitas dalam tingkat perkembangan yang baik.

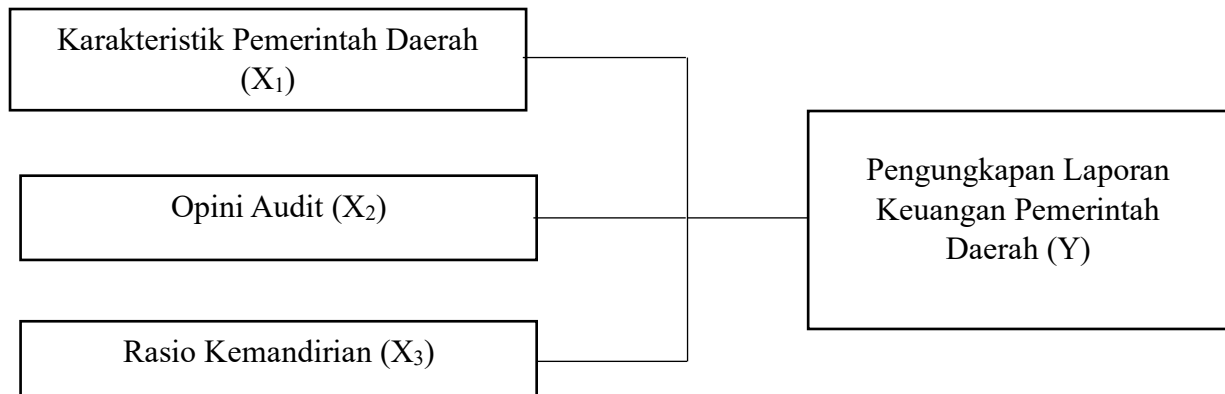
Opini Audit

Menurut BPK RI, opini pemeriksaan atau audit dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan alat yang digunakan pemeriksa untuk menyatakan pendapatnya, hasil dari opini tersebut adalah pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Heriningsih, 2013). Hasil dari pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan akan disajikan dan disusun pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah berakhirnya kegiatan pemeriksaan. Berdasarkan yang tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 ada empat jenis opini audit yang dihasilkan oleh BPK yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan pernyataan menolak memberi opini.

Rasio Kemandirian Daerah

Menurut Sularso dan Restianto (2011), rasio kemandirian mengacu pada pembiayaan daerah yang bergantung pada pendanaan dari sumber luar, khususnya pemerintah pusat dan daerah.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H1 : Karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- H1a : Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- H1b : Opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- H1c : Rasio kemandirian berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis verifikatif. Dikarenakan beberapa variabel yang ditelaah memiliki hubungan dan tujuan untuk memberikan penjelasan secara terstruktur dan faktual mengenai fakta hubungannya dengan variabel yang dianalisis. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kepada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada kurun tahun 2019-2022. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Agustus tahun 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari kabupaten dan kota yang berada di seluruh Indonesia pada periode 2019-2022. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* agar sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun laporan keuangan pada tahun 2019-2022 dan sudah diaudit oleh BPK.
- b. Kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2022 yang memiliki data lengkap untuk semua variabel penelitian.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019-2022. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.

Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan alat penelitian program SPSS. Adapun persamaan regresi berganda yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y' = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	148	61.94	82.74	72.3147	5.05677
Opini Audit	148	3.00	4.00	3.9932	.08220
RK	148	.03	1.34	.2289	.20866
DISC	148	.74	1.00	.9507	.05103
Valid N (listwise)	148				

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Temuan kesimpulan yang didapat dari tabel analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel dependen pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y) atau yang didalam tabel dengan nama disclosure memperoleh nilai minimum 0,74 dan nilai maksimum 1,00 dimana nilai rata-rata yaitu 0,9507 serta nilai standar deviasi 0,05103.
2. Pada variabel independen indeks pembangunan manusia (X1) memperoleh nilai minimum 61.94 dan nilai maksimum 82,74 dimana nilai rata-rata yaitu 72,3147 serta nilai standar deviasi 5,05677.
3. Pada variabel independen opini audit (X2) memperoleh nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 4,00 dimana nilai rata-rata yaitu 3,9932 serta nilai deviasi 0,08220.
4. Pada variabel independen rasio kemandirian (X3) memperoleh nilai minimum 0,03 dan nilai maksimum 1,34 dimana nilai rata-rata yaitu 1,00 serta nilai standar deviasi 0,05103.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		148
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00495207
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.041
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		.975
Asymp. Sig. (2-tailed)		.298

Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,298. Maka data tersebut merupakan data yang normal dikarenakan $> 0,05$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 IPM (X1)	.705	1.419
Opini Audit (x2)	.993	1.007
RK (X3)	.707	1.414

a. Dependent Variable: DISC (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas tersebut dapat ditarik kesimpulan hasilnya, yakni:

1. Variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai toleransi $0,705 > 0,10$ dan nilai VIF $1,419 < 10$ yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.
2. Variabel opini audit menunjukkan nilai toleransi $0,993 > 0,10$ dan nilai VIF $1,007 < 10$ yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.
3. Variabel rasio kemandirian menunjukkan nilai toleransi $0,707 > 0,10$ dan nilai VIF $1,414 < 10$ yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.218	.211		5.782	.000
IPM (X1)	.001	.001	.113	1.157	.249
Opini Audit (X2)	.046	.051	.074	.891	.374
RK (X3)	.009	.024	.037	.383	.703

a. Dependent Variable: DISC (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Berdasarkan temuan hasil uji pada tabel di atas, uji heteroskedastisitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel indeks pembangunan manusia mengungkapkan nilai signifikan $0,249 > 0,05$ artinya tidak berlaku heteroskedastisitas.
2. Variabel opini audit mengungkapkan nilai signifikan $0,374 > 0,05$ artinya tidak berlaku heteroskedastisitas.
3. Variabel rasio kemandirian mengungkapkan nilai signifikan $0,703 > 0,05$ artinya tidak berlaku heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.556 ^a	.309	.290	.04313	2.082

a. Predictors: (Constant), RK (X3), Opini Audit (X2), IPM (X1)

b. Dependent Variable: DISC (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas mendapatkan hasil Durbin Watson 2,082, nilai dU 1,7729 yaitu dan 4-dU yaitu 2,3098. Demikian dapat diambil kesimpulan bahwa $1,7729 < 2,082 < 2,3098$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.099	3	.033	1.322E3	.000 ^a
Residual	.004	144	.000		
Total	.103	147			

a. Predictors: (Constant), RK, IPM (X1), Opini Audit

b. Dependent Variable: DISC(Y)

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Dari hasil uji F data diatas, disimpulkan bahwa setiap variabel bebas yakni karakteristik pemerintah daerah yang dihitung menggunakan indeks pembangunan manusia, opini audit, dan rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yakni pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dibuktikan dengan nilai signifikannya yakni $0,000 < 0,05$ yang artinya hipotesis diterima. Variabel bebas secara simultan atau keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji R² (Uji Koefisien Determinasi)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.965	.964	.00514

a. Predictors: (Constant), RK, IPM (X1), Opini Audit

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Adapun hasil yang dapat diketahui dari tabel di atas yakni hasil temuan dari tabel uji R² tersebut menunjukkan bahwa R Square yaitu 0,965 atau 96,5%. Artinya, 96,5% variasi variabel dependen yakni pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan variabel independen yaitu karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), opini audit, dan rasio kemandirian. Dan sebesar 3,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam variabel penelitian ini.

Uji T (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.141	.020		56.882	.000
IPM (X1)	.091	.001	.951	60.995	.000
Opini Audit	.046	.005	.144	9.243	.000
RK	-.024	.002	-.186	-11.924	.000

a. Dependent Variable: DISC(Y)

Sumber: Hasil Output SPSS (2024)

Dari hasil tabel uji t di atas dapat memberikan hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan keuangan pemerintah daerah

Variabel karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (X1) mempunyai nilai uji t sebesar 60,995 dengan signifikan $0,000 > 0,05$. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H1a diterima. Artinya, hipotesis karakteristik pemerintah daerah yang dinyatakan dengan menggunakan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji t di atas menunjukkan bahwa nilai Beta yakni 0,091 yang berarti bahwa nilai Beta positif. Dikarenakan hal itu menandakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Utami dan Sulardi (2020), yang memberikan hasil bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian Najah, U (2019) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya dorongan untuk pemerintah dalam menyajikan pengungkapan yang sesuai dan tidak adanya motivasi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian dari tabel uji t menunjukkan variabel opini audit (X2) dalam uji t yaitu 9,243 dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H1b diterima. Artinya, hipotesis opini audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji t di atas menunjukkan nilai Beta sebesar 0,144 berarti nilai Beta adalah positif. Dikarenakan hal ini menandakan opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Naopal dkk (2017), yang menjelaskan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Budiarto dan Indarti (2019), Putri dan Arza (2019), Utami dan Sulardi (2020), dan Widyaningrum (2023), dalam temuan penelitiannya menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Opini yang diberikan BPK tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel rasio kemandirian (X3) menunjukkan bahwa uji t mempunyai nilai sebesar -11,924 dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H1c diterima. Artinya, hipotesis rasio keuangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji t di atas menunjukkan nilai Beta sebesar -0,186 yang berarti bahwa Beta bernilai negatif. Dikarenakan hal itu menandakan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara negatif oleh rasio kemandirian.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Simbolon dan Kurniawan (2018) dan Utami dan Sulardi (2020), bahwa rasio kemandirian memiliki pengaruh yang negatif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Najah, U (2019), yang menemukan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian yang perbedaan dikarenakan perbedaan pendekatan dalam pengukuran variabel rasio kemandirian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan pengujian dalam penelitian ini menghasilkan Kesimpulan yaitu karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian berpengaruh secara keseluruhan atau simultan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan

laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Terdapat keterbatasan yang ditemui dalam proses melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada periode 2019 hingga 2022.
3. Hanya tiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yakni karakteristik pemerintah daerah yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), opini audit, dan rasio kemandirian. Yang diteliti dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat yakni pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Peneliti memiliki keinginan atau harapan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya atau yang akan datang diharapkan dapat menambah variabel atau menggunakan objek lainnya yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seperti ukuran suatu pemerintah daerah, umur administrasi pemerintah daerah, *leverage*, belanja daerah, dsb.
2. Pada penelitian berikutnya diharapkan bisa memperluas sampel dengan menggunakan kabupaten dan kota yang berada di daerah lain atau melakukan penelitian pada tahun periode yang terbaru, sehingga hasil penelitian lebih berkembang dan berkualitas.
3. Pemerintah daerah diharapkan untuk menambah semangat dalam mempertahankan atau mengembangkan kualitas laporan keuangan daerahnya dengan melakukan penyajian pengungkapan dengan sesuai sehingga mendapatkan opini baik yang diberikan oleh BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Utami, S. R., & Sulardi, S. 2020. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 253. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436>
- Ghina Emiliana, 174020097, & Dr. H. Atang Hermawan, S. E. 2021. Pengaruh Opini Audit dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat [Other, Universitas Pasundan Bandung]. <http://repository.unpas.ac.id/53626/>
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Suhardjanto, D., Yulianingtyas, R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret.
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (n.d.). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. 2019. Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549>
- Putri, W. M., & Arza, F. I. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.131>
- Widyaningrum, R. 2023. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44124>

- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. 2021. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Andi.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. 2017. Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 7.
- Setyowati, Lilis. 2016. Determinan Yang mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Jurnal Bisnis dan Manajemen
- Sasmita, R. P. H. 2021. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Bpk terhadap Understandability Dalam Kualitas Laporan Keuangan. *Modus*, 33(1), 98–119. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4171>
- Dianti, M. M. 2022. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian dan Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 dalam paragraf 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekrayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga.
- Lesmana, S.I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia (Tesis). Universitas Sebelas Maret, Program Pasca Sarjana, Surakarta.
- Heriningsih, S. 2015 : Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. 2011 : Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1 (2), 113.
- Najah, U. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kualitas Hasil Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Lkpd. *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 4(2). <https://doi.org/10.52062/Keuda.V4i2.884>